

Mitsuo Nakamura, et al.

Prolog:

Ahmad Syafi'i Maarif

Muhammadiyah Menjemput Perubahan

Tafsir Baru Gerakan Sosial-Ekonomi-Politik

Editor:

Mukhaer Pakkanna & Nur Achmad

Kerja Sama P3SE STIE Ahmad Dahlan Jakarta
dan Penerbit Buku Kompas



Muhammadiyah Menjemput Perubahan

Tafsir Baru Gerakan Sosial-Ekonomi-Politik
Hak Cipta © P3SE STIE Ahmad Dahlan Jakarta

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia
oleh Penerbit Buku Kompas, Juni 2005
PT Kompas Media Nusantara
Jl. Palmerah Selatan 26-28
Jakarta 10270
e-mail: buku@kompas.com

KMN 26005032

Editor: Mukhaer Pakkanna&Nur Achmad
Desain sampul: AN Rahmawanta
Penata letak: Ratno

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Muhammadiyah Menjemput Perubahan
Tafsir Baru Gerakan Sosial-Ekonomi-Politik, Cet. 1
Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005
xxvi + 300 hlm.; 14 cm x 21 cm
ISBN: 979-709-193-8

Isi di luar tanggung jawab Percetakan Grafika Mardi Yuana, Bogor

Daftar Isi

Daftar Isi	v
Pengantar Penerbit	viii
Pengantar Editor	
Perlunya Tafsir Baru Gerakan Muhammadiyah	x
Isitilah	
Muhammadiyah Menyongsong Perubahan Multidimensional	
Azrul Tanjung-Ketua STIE Ahmad Dahlan	xvii
Prolog	
Merajut Pemikiran, Melangkah untuk Aksi	
Ahmad Syafii Maarif-Ketua PP Muhammadiyah)	xxi
<hr/>	
Bagian Pertama	
Tafsir Baru Gerakan Sosial-Budaya Muhammadiyah	
1. Profetisme Pembaruan Gerakan Sosial-Budaya	
dalam Satu Abad Muhammadiyah	
(Abdul Munir Mulkhan)	3

2. Menggagas Muhammadiyah Masa Depan: Percikan Pemikiran Sosial-Budaya (Nur Achmad & Rifma Ghulam Dz)	39
3. Sebuah Keharusan Sejarah: Reformulasi Gerakan Tajdid Muhammadiyah (Maneger Nasution)	55
4. Membangun Peradaban Islam: Menengok Peran Muhammadiyah (Suhardi)	74
5. Dari Reformasi Sosial-politik ke Trans-national Civil Society: Rekonstruksi "Network" NU-Muhammadiyah (Piet H Khaidir)	88
6. Muhammadiyah dan Islam Liberal (Pramono U Tanthowi)	95

Bagian Kedua

Tafsir Baru Gerakan Sosial-Ekonomi Muhammadiyah

1. Muhammadiyah dan Kegamangan Soal Bunga Bank (Fathurrahman Djamil)	105
2. Penguatan Ekonomi Muhammadiyah: Melalui Kelembagaan Sistem Perbankan Syariah (Achjar Iljas)	136
3. Obyektivikasi Gerakan Pemberdayaan Ekonomi: Reformulasi Peran Muhammadiyah (Azrul Tanjung)	166
4. Membangun Gerakan Ekonomi Muhammadiyah: Dari Dekonstruksi Kasus Menuju Rekonstruksi Teologi (Mukhaer Pakkanna)	183

Bagian Ketiga

Tafsir Baru Gerakan Sosial-Politik Muhammadiyah

1. Muhammadiyah Faces the Challenge of Democracy (Mitsuo Nakamura)	215
2. Memperbarui Pembaruan Muhammadiyah Telaah Sosial Politik (Sudarnoto Abdul Hakim)	230
3. Khittah Muhammadiyah Digugat (Abd. Rohim Ghazali)	245
4. Muhammadiyah dan Politik: Dilema Khittah Muhammadiyah (Maryogi Jass)	250
5. Pemutakhiran Intensi Politik Muhammadiyah (Imam Addaruqutni)	258

Epilog

Independensi Kultural Muhammadiyah

Sebagai Basis "Civil Islam" di Indonesia (Sukidi)	278
Indeks	285
Sekilas tentang Penulis	297

Menggagas Muhammadiyah Masa Depan

Percikan Pemikiran Sosial-Budaya

Nur Achmad & Rifma Ghulam Dz

"Zaman sekarang tidak seperti dulu. Dahulu, orang-orang di sini berbeda dengan orang-orang di dataran rendah. Mereka tidak tertarik untuk mengenakan pakaian bagus yang menarik perhatian mereka sendiri, atau makan makanan tertentu seperti yang dapat anda lihat sekarang. Sekalipun ada orang yang berlebihan dan ada yang kekurangan, tetapi pakaian dan makanan mereka sama saja. Di musim panen semua orang bekerja bersama di sawah. Tidak ada orang yang malu mempunyai tangan yang kasar atau kaki kotor. Sekarang lain, mereka yang kaya maunya memerintah dan menjaga agar tangan dan kakinya bersih dari lumpur. Mereka mengingatkan apa saja yang pernah mereka berikan pada orang lain dan apa saja yang mereka terima. Persis seperti orang-orang di dataran rendah. Segala sesuatu diperhitungkan dan dimiliki"

(Tosari, seorang petani, dalam Hefner, 1999)

Sekiranya tata kehidupan sosial tidak terstratifikasi sedemikian kompleks, dalam struktur hierarkis, pengkastaan,

pembagian kelas sosial, aturan birokratis, dan terfragmentasi secara sosial ekonomi, tentulah kesamaan antarmanusia tidak akan menjadi sesuatu yang diributkan, apalagi dipertentangkan dan menjadi problem abadi umat manusia. Kita tidak akan mengagumi pemikiran Karl Marx yang secara heroik menyeru tentang pertentangan kelas, penguasaan atas *the mode of production* secara sepihak, dan semacam "jihad" untuk memerjuangkan nasib kelas *proletar* dalam konsep penghapusan kelas sosial dalam masyarakat.

Seandainya perkembangan zaman tidak membawa perubahan kehidupan sosial yang demikian berubah, yaitu dari masyarakat praindustri menuju masyarakat industri, antara masyarakat perdesaan dan perkotaan, ataupun dinamika dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern, tentulah kita tidak pernah belajar tentang dinamika dan transformasi sosial suatu masyarakat. Kita tidak perlu *repot* ikut berpikir seperti pembagian Ferdinand Tönnies tentang *gemeinschaft* dan *gesellschaft*. Demikian juga kita tidak akan pusing dengan perkembangan kapitalisme yang luar biasa, termasuk dengan seperangkat kasus-kasus konflik kepentingan dan kesenjangan sosial yang semakin tampak jelas.

Demikian halnya, bila situasi kehidupan sosial suatu masyarakat tertata rapi dan bersendi kemakmuran untuk bersama, seperti tampak dalam catatan sejarah, tentang betapa hebatnya solidaritas masyarakat pada pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz (99-102 H/717-720 M), di mana khalifah merasa sulit mencari warganya yang masih miskin dan butuh makanan. Saat itu kesadaran masyarakat untuk saling berbagi sesama dan bersama sangat tinggi. Bisa jadi hal tersebut sekadar utopia semata. Bila tidak, mengapa gerakan untuk keadilan sosial seperti yang digelorakan Abu Dzar al-Ghifari menghentak penguasa-penguasa kikir dan korup yang kemudian kekuasaan tersebut melibas beliau. Jika tidak begitu, tidak perlu ada protes terhadap *statement* Thomas Hobbes yang

mengatakan "*homo homini lupus*" (manusia adalah pemangsa bagi yang lain). Kita pun tidak perlu dikejutkan dengan praktik semangat mafioso yang digambarkan sosiolog Diego Gambetta, "*Ambillah keuntungan dari orang lain di luar keluargamu sendiri pada setiap kesempatan, karena jika tidak mereka akan mengambil keuntungan terlebih dulu dari kamu*". Demikian juga tidak perlu bersusah-payah menghentikan pelanggaran HAM, penjajahan, eksploitasi ataupun penindasan di berbagai belahan Bumi.

Sederet prakiraan, imaji, sangkaan, fantasi ataupun bayangan sejarah kehidupan di atas, sejujurnya jelas merujuk suatu perilaku dan tata kehidupan sosial yang sedari awal selalu berporos pada perebutan akan keseimbangan sosial (*social balancing*). Di mana dalam perkembangan sejarah umat manusia, tatanan sosial senantiasa berkutat pada hierarki sosial, birokratisasi, identifikasi, dan otorisasi berbeda, serta klasifikasi sosial yang senjang dan tidak mungkin disamakan.

Identitas, Aspirasi, dan Otoritas Berbeda

Identitas sosial suatu masyarakat sejak awal semestinya bisa dianggap sebagai cetak biru (*blue print*) yang menandai sisi kepribadian dan *character building* suatu masyarakat. Identitas sosial tersebut menawarkan suatu sistem nilai kebudayaan yang memayungi dan menggerakkan ke mana kehidupan sosial suatu masyarakat akan diarahkan. Dengan membaca identitas sosial yang ada, langkah transformasi dan perubahan sosial dapat diprakirakan hendak ke mana. Patut juga dicermati, bahwa identitas sosial ini pun senantiasa berubah seiring perkembangan sejarah dan transisi kehidupan sosial ekonomi dan politik bangsa.

Dulu bangsa ini identik dengan kehidupan masyarakat yang toleran, terbiasa dengan tradisi saling tolong-menolong (gotong-royong), mudah memaafkan, serta menjunjung tinggi adat luhur ketimuran yang lain. Kini kita melihat pergeseran

yang cukup signifikan. Saat ini bangsa kita sering dilihat sebagai bangsa dengan masyarakat yang berada dalam transisi, baik dalam kehidupan berdemokrasi maupun dalam kehidupan sosial yang lebih riil. Indonesia kini terbiasa dengan konflik sosial, perpecahan antardaerah, pendendam satu dengan yang lain, individualistis, serta pola pikir dan kebiasaan hidup yang mengarah pada kondisi kebarat-baratan (*westernized*).

Tradisi dan kebiasaan sosial di atas itulah yang dapat dilihat sebagai identitas sosial suatu bangsa dan masyarakat. Identitas sosial tersebut membawa implikasi sosial lain yang ditunjukkan oleh adanya aspirasi dan otoritas yang berbeda. Konsekuensi dari suatu tradisi dan kebiasaan sosial yang dibangun dan diadakan dalam suatu masyarakat, menandai ke arah perubahan aspirasi dan otoritas yang lain dari sebelumnya. Bila penggambaran sederhana seperti di atas yang dipakai, maka aspirasi sebagai suatu bangsa dengan kehidupan masyarakat yang seimbang dan setara dalam konteks keadilan sosial, serta-merta telah bergeser menjadi suatu aspirasi yang terfragmentasi, masyarakat bangsa yang terbelah, serta terhegemoni secara luar biasa. Identitas yang membuat aspirasi kita sebagai bangsa dan masyarakat tertindas dan berada dalam bayang-bayang bangsa atau masyarakat lain.

Sementara itu, otoritas yang dulu mengandung semangat kebersamaan, persaudaraan, dan sebagai kesatuan identifikasi sosial kerakyatan-kebangsaan yang independen, berdaulat penuh, dan membaur dalam kepentingan arus bawah, kini secara perlahan telah berganti menjadi otoritas yang tidak tahan kritik, semena-mena dalam ukuran politik, sewenang-wenang secara ekonomi, dan berlaku cenderung membedakan (diskriminatif) secara sosial. Identifikasi sosial sebagai otoritas yang independen, berdaulat penuh, dan membaur untuk rakyat, nyaris hilang sama sekali, hanya kepentingan saja yang tersisa.

Akibatnya, identitas sosial berubah total. Ia tidak lagi menjadi sandaran nilai yang mampu menghasilkan "kebaikan" dalam wujud aspirasi dan otoritas yang baik. Identitas nilai hanya menjadi hiasan moral bagi legitimasi sebagian kecil "mereka" dan *utopia* keadilan bagi sebagian besar masyarakat. Lebih dari itu, aspirasi yang berkembang tidak lagi berdasar pada identitas sosial yang ada, melainkan lebih merujuk pada posisi sentral yang dimainkan otoritas berkuasa. Otoritas, kini tidak lagi tunggal dan terpusat, melainkan ia telah menjadi jejaring dan strategi yang efektif bagi pencapaian kepentingan dan kekuasaan semata.

Dahlan, Ruh Perubahan, dan Muhammadiyah

KH. Ahmad Dahlan secara biologis bukan keturunan kraton (bangsawan) yang *ningrat* dengan status kasta dan memiliki hierarki sosial politik yang berbeda. Meski begitu, Dahlan hidup dalam alam Kauman Yogyakarta yang masih sarat dengan keningratan dan mengalami nasib sebagai rakyat yang terjajah, baik dalam sistem kraton maupun kolonialisasi Belanda. Sebagai misal, kasus penentuan arah kiblat dalam proses gerakan Islamisasi awal di Kauman, serta sindikasinya dalam jaringan pergerakan kemerdekaan Boedi Oetomo.

Dahlan adalah rakyat biasa, seorang penganut *Islam "rahmatan lil alamin"* yang terbiasa dan terdidik dengan semangat pluralistik, perlawanan terhadap kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan, serta selalu mengajak bekerja untuk berubah ke arah kemakmuran bersama dan untuk sesama. Semangat Dahlan lahir dan terbentuk melalui pengalaman beliau dalam menuntut ilmu keislaman, berada dalam suasana kehidupan masyarakat yang bodoh, miskin, dan terbelakang, serta efek keberhasilannya dalam berdagang.

Dahlan memiliki semangat dan kesadaran bersama lewat mobilisasi rakyat kecil, yaitu pedagang pribumi, pekerja

Jawatan Kereta Api dan para buruh untuk bergerak melawan serta melakukan perubahan bagi kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Dahlan dan kawan-kawan berani melawan dominasi dan monopoli etnis Cina di Kotagede dan Kauman Yogyakarta. Sementara Haji Fachruddin memobilisasi masyarakat Pleret, Klaten, dan Solo untuk membakar perkebunan tebu yang dikuasai Belanda sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem kebijakan yang menzalimi rakyat buruh perkebunan. Haji Fachruddin atas nama Muhammadiyah juga berani melawan kebijakan pemerintah Kolonial Belanda yang memberlakukan Ordonansi Perkawinan terhadap kaum muslimin [Sasjardi, 1981: 62]. Bagi Dahlan, "sedikit bicara dan banyak bekerja" merupakan tuntutan zaman ketika itu. Suatu keharusan zaman yang kemudian membesarkan Muhammadiyah dengan lahan amal usaha yang sangat luas dan beragam.

Semangat zaman dan bukti perlawanan ke arah perubahan yang digerakkan Dahlan menghasilkan sekolah-sekolah Muhammadiyah yang memberi pencerdasan dan pencerahan terhadap kebanyakan rakyat yang miskin dan masih bodoh. Balai pengobatan ibu dan anak, serta PKO (*Penolong Kesejahteraan Oemoem*) atau sekarang rumah sakit Muhammadiyah yang membantu dan menolong para ibu, anak-anak dan mereka yang sakit, tetapi miskin, tidak memiliki biaya pengobatan dan kesehatan kala itu. Juga membuat panti asuhan Muhammadiyah untuk menampung dan mendidik anak-anak yatim yang miskin, terlantar, dan tidak jelas masa depannya. Model perlawanan di atas dalam sejarah pergerakan Muhammadiyah cukup eksis hingga periode kedua sejarah kepemimpinan dalam Muhammadiyah.

Pascaperiode kedua (pasca-Tanwir 1939) yaitu setelah periode Haji Mas Mansoer, di mana sistem kepartaian dan keterlibatan Muhammadiyah dalam politik semakin tak terbandung lagi, bahkan hingga sekarang. Maka gerakan sosial di atas relatif hanya menjadi "ritual pelengkap" bagi tradisi

politik dan birokratisasi yang semakin kuat mengakar di tubuh Muhammadiyah. Pascaperiode kedua ini, identifikasi sosial Muhammadiyah lebih tampak dalam aktivitas massa pendukung dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS) yang terbiasa dengan birokratisasi pemerintah. Mereka rata-rata minim secara ekonomi, dan rendah semangat perlawanannya terhadap *status quo* bagi berlangsungnya perubahan sosial ke arah yang lebih baik.

Pascaperiode kedua hingga sekarang (2005,-*Ed.*), Muhammadiyah lebih identik dengan simbol besar keormasannya *ketimbang* loncatan dan gerakan-gerakan sosial baru yang lebih riil, manusiawi, dan beradab. Muhammadiyah dan ortom-ortomnya sekarang mungkin lebih besar jaringannya dan lebih banyak pula aspek yang ditangani, tetapi jaringan kerja dengan LSM, *funding* asing, maupun lembaga pemerintah lebih menyiratkan sisi semakin kuatnya politik Muhammadiyah sebagai ormas dalam lingkaran tersebut, dan sebaliknya bukan disebabkan langkah dan terobosan baru Muhammadiyah sebagai gerakan sosial dan dakwah.

Di sisi lain, formalisasi dan birokratisasi di tubuh Muhammadiyah terasa lebih ketat dan kaku. Kondisi ini tampak sekali dalam hierarki struktur pimpinan organisasi yang terasa lebih mengesankan ambisi politik, serta semacam kekakuan Muhammadiyah dan orang-orangnya untuk berkutat secara pragmatis dalam politik praktis. Hal ini tidak sekadar "menjangkiti" pimpinan teras tertentu di Muhammadiyah, bahkan anak-anak muda Muhammadiyah yang selama ini alergi terhadap politik praktis pun, kini berbondong-bondong mengarahkan aspirasinya ke sana, termasuk juga mengarahkan Muhammadiyah dan ortom-ortom AMM (Angkatan Muda Muhammadiyah). Arah ambisi orang-perorang maupun Muhammadiyah dan ortom-ortomnya tersebut, nyata sekali tampak pada dukungan mereka di Pemilu Presiden 2004 putaran pertama. Kenyataan ini kemudian lebih menguat lagi

melalui rekomendasi pembentukan "partai politik" baru lewat forum tanwir, baik Tanwir Pemuda Muhammadiyah bulan Oktober 2004 di Banjarmasin, dukungan "memperbolehkan" lewat Tanwir Muhammadiyah di Mataram Desember 2004, maupun melalui upaya deklarasi Perhimpunan Amanat Muhammadiyah (PAM) oleh kalangan AMM (*minus* IRM) di awal Maret 2005.

Kondisi ini jelas berbeda dan bahkan mencederai paradigma kemuhammadiyah yang telah dipancarkan generasi awal (*al-sabiquna al-awwalun*). Di mana harus ada perbedaan dan pemisahan yang jelas antara keberpihakan diri orang-orang, baik dalam aktivitas kelembagaan lain, maupun menyangkut politik praktis. Pilihan yang dilakukan Ahmad Dahlan, Haji Fachruddin, Haji Hisyam maupun Haji Syuja' yang lebih memilih keluar dari Boedi Oetomo dan Sarekat Islam, dan mengutamakan Muhammadiyah, merupakan pilihan terbaik generasi awal. Suatu pilihan yang senada dengan rumusan *ijtihad* periode Haji Mas Mansoor pada Tanwir Muhammadiyah 1939. Sebuah pilihan jalan lurus, sekaligus penegasan jati diri Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan sosial murni *an sich*. Pemisahan institusi Muhammadiyah dari politik dan intrik di dalamnya, merupakan capaian ideal bagi arah dan *platform* gerakan yang lebih jelas dan berakar secara sosial ke massa bawah (*grassroots*). Lebih lanjut, itulah obat terbaik agar bebas dari trauma psikologis efek politik yang cukup telak menohok Muhammadiyah ketika terlibat aktif secara institusi di Masyumi maupun Parmusi.

Muhammadiyah: Gerakan Dakwah Sosial Murni

Muhammadiyah sebagai sebuah organ sosial yang mempunyai tujuan dakwah Islam dan didesain untuk melahirkan piranti-piranti sosial yang membantu mengentaskan umat dari kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, maupun kejumudatan

pemikiran, semestinya tetap berpijak pada arah tujuan dan *mainstream* awalnya sebagai gerakan dakwah dan sosial. Sekalipun sangat mungkin terjadi perkembangan dan perubahan ke arah penyempurnaan dari tujuan dan *mainstream* sebelumnya. Akan tetapi, proses perkembangan dan perubahan tersebut harus tetap dimaknai sebagai proses kebudayaan sebagaimana proses belajar yang tidak akan pernah selesai. Proses pemaknaan dan penyempurnaan perangkat dan segenap aspek di dalamnya ke arah yang lebih baik. Karenanya, segala yang menyangkut ideologi, kepribadian, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, termasuk seluruh program dan kebijakan Muhammadiyah tidak boleh dibiarkan membeku begitu saja sebagai dogma dan ritual. Semua *spirit* bermuhammadiyah tersebut harus selalu diperbarui menurut semangat zamannya.

Sebagai gerakan dakwah dan sosial, Muhammadiyah menekankan pada pencitraan "*baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*" dan perwujudan diri umat sebagai *masyarakat utama*. Suatu pencitraan diri keumatan yang konsisten pada pencapaian sosial yang paling tinggi, asasi, dan tercerahkan menyangkut kemakmuran dan kebaikan secara sosial, ekonomi, dan politik. Suatu masyarakat di mana keutamaan, kesejahteraan dan kebahagiaan luas merata, serta keadilan berlaku di dalamnya, seperti tertuang dalam *Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah*.

Menurut Mahmoud Mohamed Taha (1996: 223) masyarakat yang baik didasarkan atas tiga kesetaraan, yaitu: kesetaraan ekonomi, yang dikenal dengan sosialisme atau pemerataan kesejahteraan; kesetaraan politik atau demokrasi, atau pembuatan keputusan yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari yang dikerjakan secara bersama-sama; dan kesetaraan sosial, dengan beberapa perluasan dan dicirikan tidak adanya diskriminasi, pertentangan kelas, dan status sosial, maupun disparitas berdasarkan kewilayahan. Karena itu pencitraan

diri umat dalam konteks gerakan Muhammadiyah sebagai masyarakat utama (*baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*) tidak bisa mengesampingkan tiga kesetaraan di atas. Sebab sesuai dengan sejarah perjuangan Dahlan dan generasi awal Muhammadiyah, maka gerakan-gerakan yang dilakukan Muhammadiyah selalu bersandar pada perbaikan untuk pemerataan ekonomi dan kesejahteraan para pribumi, mobilisasi kepentingan umat dalam kebijakan-kebijakan negara, serta upaya yang tiada henti untuk menekan terhadap diskriminasi, keterbelakangan, dan kesenjangan sosial.

Bila Muhammadiyah dilihat sebagai gerakan sosial murni, setidaknya hal tersebut dapat dibaca melalui enam prinsip yang dikatakan Ahmad Dahlan (1923), yaitu: *Pertama*, masalah itu harus dirumuskan atas dasar pemahaman terhadap realitas; *Kedua*, berpikir dan bertindak harus dilakukan secara sungguh-sungguh; *Ketiga*, setiap tindakan harus didasarkan pada akal yang jelas untuk menghindari kesalahan; *Keempat*, seseorang harus memelihara apa yang telah dicapai karena ia merupakan modal yang berharga; *Kelima*, harus ada keyakinan teguh dalam membuat pilihan; *Keenam*, seseorang harus mampu menempatkan dan memecahkan masalah secara benar, karena pengetahuan hanya akan menjadi sia-sia, jika tidak diamalkan sesuai dengan situasi nyata (Jainuri, 2002: 104).

Dengan begitu, Muhammadiyah benar-benar hadir sebagai wadah, alat, dan strategi yang secara taktis dan transformatif melakukan perubahan sosial bagi umat. Muhammadiyah tetap menempatkan pendidikan, perbaikan mutu hidup, kesejahteraan dan kemakmuran umat sebagai target dan tujuan gerakannya dalam bingkai keadilan sosial masyarakat utama. Di sinilah pentingnya, maka Muhammadiyah tidak hanya sekadar melanjutkan praktik amal usaha, melainkan harus mengupayakan pencapaian kualitas dan keunggulan secara intelektual dalam pendidikan, perbaikan dan perluasan pelayanan kesehatan dan santunan sosial, perbaikan mutu hidup

dan mengurangi kesenjangan sosial, peningkatan pola pikir sosial-keagamaan, serta jangkauan jaringan strategis bagi transformasi masyarakat lapis bawah.

Praktik amal usaha Muhammadiyah maupun pengembangan *tarjih* dan *tajdid* Muhammadiyah, tidaklah cukup hanya dipahami dalam bingkai program dan gerakan karitatif maupun konformatif di atas. Muhammadiyah secara kritis dan lewat praktik riilnya harus dibaca sebagai model pengembangan lanjutan dari ideologi tradisi kebaikan [*al-birr*] dan *amar ma'ruf*-nya. Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan, haruslah benar-benar secara strategis dapat dibaca menurut pola dan taktik pembaruan masyarakat [*social reform*]. Pembacaan dan praktik atas realitas yang ada, tentulah akan mampu memberi warna yang beragam bagi tumbuhnya model-model pengembangan dan pemberdayaan masyarakat secara lebih terarah dan tercerahkan, yaitu suatu pembacaan *social reform* yang tidak memberdayakan semata, melainkan telah menyentuh sisi manusiawi yang membebaskan.

Dari Tauhid Sosial ke Gerakan Dakwah Sosial Murni

Kira-kira tahun 1993-an Muhammadiyah seakan bangun dari tidur, tatkala muncul pemikiran kreatif setelah sekian lama *jumud* dalam aktivitas praktis organisasi semata. Lahirnya gagasan *tauhid sosial* dengan beberapa hal di dalamnya, seperti implementasi iman atas kehidupan sosial, keadilan sosial, pemerataan kemakmuran bagi kaum miskin, dan zakat profesi merupakan kreasi yang sedikit banyak mengembalikan ingatan tentang hakekat Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah sosial murni, dan harapan besar untuk memperbaiki kehidupan umat. Tetapi kondisi peta politik Indonesia yang dilanda konflik dan krisis sejak tahun 1998, menyebabkan arus besar tersebut menyeret komunitas masyarakat termasuk orang-orang Muhammadiyah terlibat di dalamnya. Tauhid sosial pun seakan raib ditelan hingar-bingar politik bangsa.

Muhammadiyah sebagai gerakan yang didirikan oleh para pedagang (*entrepreneur*) yang termasuk kelas menengah, banyak dipengaruhi semangat masyarakat liberal (merdeka) dan lebih menunjukkan diri sebagai citra kaum urban. Situasi dan kondisi yang sebenarnya relatif efektif membuat perubahan, sekaligus rawan secara sosial terhadap eksklusivitas diri dalam tata masyarakat. Jika Protestanisme, menurut Weber [1986: 153], dapat berkembang dan merubah tata kehidupan dengan berpegang pada etos dan spirit ajarannya, maka semestinya Muhammadiyah pun dapat melakukan hal yang sama. Dengan demikian, Muhammadiyah pun tetap merujuk pada ajaran Islam [*al-ruju' ila al-Qur'an wa al-Sunnah*] yang memiliki titik tekan kuat terhadap tuntutan perubahan sosial [*social reform*] yang mengarah pada kemakmuran dan keadilan bersama untuk seluruh masyarakat.

Kelas menengah—mayoritas para pedagang dan birokrat pegawai negeri—sebagai lapisan terbesar warga Muhammadiyah lebih sering mendatangkan pemahaman, bahwa Muhammadiyah hanya milik mereka yang mampu secara sosial, dan diperuntukkan bagi yang mampu saja. Akibatnya, citra kaum urban yang memiliki motivasi kuat untuk melakukan perubahan seakan tidak tampak ke permukaan. Wajah urban Muhammadiyah berubah menjadi wajah "kuyuh" para penyandang beban sosial di masyarakat. Selanjutnya, proyek program karitatif menjadi baku mutu bagi keberhasilan Muhammadiyah. Padahal kegiatan dan program semacam itu telah diabaikan dan dinilai tidak pernah membebaskan mereka yang lemah dan tertindas.

Seiring perkembangan menjelang 100 tahun, Muhammadiyah dituntut melakukan pembacaan ulang "tafsir *al-Maun*" secara lebih membebaskan sesuai dengan konteks zaman kini. Kebaikan (*al-birr*) dan *amar ma'ruf* lebih dimaknai dalam kaca mata perkembangan globalisasi dunia. Pencitraan gerakan dakwah yang tidak lagi terbatas karitatif belaka,

melainkan lebih menyentuh sektor-sektor riil yang bersifat transformatif dan membebaskan. Agenda *migrant care* (buruh migran), perburuhan, petani dan nelayan miskin, serta kaum miskin kota (*urban poor*) semestinya menjadi agenda serius Muhammadiyah sekarang. Demikian halnya menyangkut problem struktural dalam kasus-kasus sosial [*social in justice*], semacam penggusuran, perlindungan konsumen, perlindungan pedagang kecil, serta ketimpangan-ketimpangan sosial di lokal-lokal daerah. Bila mengingat bahwa para buruh pabrik di perkotaan, buruh migran, nelayan di pesisir Paciran, Sedayu Gresik maupun di pesisir laut lain, pedagang kecil kaki lima dan pasar tradisional, para konsumen, serta *urban poor* merupakan mayoritas muslim, dan sebagian adalah warga Muhammadiyah. Sementara Muhammadiyah memiliki banyak ahli (*expert*) dan konsultan di berbagai bidang kehidupan riil tersebut. Semestinya Muhammadiyah menyediakan porsi yang lebih banyak bagi advokasi dan pembelaan terhadap masyarakat marjinal korban kebijakan struktural tersebut.

Dalam hal lain, belajar dari kasus bencana Tsunami dan gempa bumi di Aceh dan Nias, maka upaya *emergency* dan penanganan terhadap kejadian dan korban bencana alam juga harus dipikirkan bersama. Muhammadiyah sudah saatnya membuat sebuah pusat penanganan bencana dan kejadian luar biasa. Lembaga ini bertugas menyiapkan relawan terlatih, membuat posko-posko di berbagai daerah dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, mengorganisir penanganan pascabencana terhadap para korban, membangun semacam *children care centre*, restrukturisasi pemukiman dan unit usaha ekonomi, serta turut serta terlibat dalam merumuskan cetak biru kebijakan pemerintah untuk pembangunan jangka panjang.

Dalam dua hal yang disebut terakhir, Muhammadiyah benar-benar jauh tertinggal. Bukan rahasia lagi bahwa Aceh dan sekitarnya adalah daerah basis Muhammadiyah (lihat

ketika Mukhtamar tahun 1995), tetapi apa yang telah dilakukan Muhammadiyah di Aceh (dan juga bencana di tempat-tempat lain) sangat jauh dari yang diharapkan. Muhammadiyah terkesan sangat lamban dan hampir tak bisa berbuat sesuatu. Seakan Muhammadiyah tergeser posisinya oleh lembaga-lembaga amal-sosial "dadakan" yang memang banyak tumbuh bak jamur di musim hujan. Posko-posko penanggulangan bencana dan dompet-dompet peduli yang bermunculan terasa lebih sigap dan peduli terhadap kondisi sulit tersebut. Kenyataan ini ironis sekali. Ataukah ada kemungkinan lain, misalnya faktor keikhlasan dalam beramal sehingga nama Muhammadiyah harus disembunyikan dan tidak perlu diketahui khalayak luas?!

Padahal jika kita menengok sejarah, langkah penanganan *emergency* di atas sejalan dengan misi didirikannya *Penolong Kesengsaraan Oemoem* pada tahun 1918 [Weinata Sairin, 1995: 54]. Di mana PKO mula pertama didirikan terutama untuk meringankan penderitaan rakyat akibat meletusnya Gunung Kelud. Kemudian aktivitas PKO lebih diperluas setelah menjadi bagian khusus [Majelis Pembina Kesejahteraan Umat] Muhammadiyah di tahun 1921. PKO sejak itu melebarkan sayap aktivitasnya dengan turut serta melakukan penanganan terhadap anak yatim, fakir miskin, mendirikan klinik, balai kesehatan ibu dan anak, serta rumah sakit Muhammadiyah. Dalam perkembangannya kemudian, Majelis Pembina Kesejahteraan Umat diubah namanya menjadi Majelis Pembina Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Agenda besar yang bersifat transformatif pada bidang-bidang kehidupan riil serta penanganan *emergency* tersebut akan memberi kontribusi positif bagi lahirnya tafsiran baru terhadap ideologi gerakan dan perjuangan Muhammadiyah. Dengan demikian Muhammadiyah diharapkan tidak lagi *stagnan* dengan amal usahanya yang semakin lama semakin "memasung" dan tidak mencerahkan, termasuk bagi banyak

pihak yang mengelolanya. Amal usaha pendidikan maupun kesehatan sekarang ini lebih banyak dijalankan secara profesional (baca: *financial oriented*) bagi pencapaian *profit sharing*, karenanya seringkali menjadi ajang "perkelahian". Sementara upaya peningkatan mutu dan layanan sosial untuk masyarakat miskin relatif hanya sekadarnya saja, untuk tidak dikatakan tak peduli. Dalam banyak hal Rumah Sakit Muhammadiyah tidak berbeda dengan rumah sakit lain, yaitu sekadar bisnis kesehatan untuk mencari keuntungan belaka. Akhirnya, aspek profesional tidak terkejar, aspek sosial pun lenyap. Lebih parah lagi, banyak amal usaha Muhammadiyah yang tidak berkembang dengan baik, bahkan ada yang "gulung tikar", padahal pimpinan dan pengelola amal usaha tersebut kebanyakan telah meningkat status sosial dan kepemilikannya secara ekonomi. Ternyata, akumulasi kapital amal usaha yang berlebih tidak melahirkan perubahan sosial dan pembebasan ke arah kehidupan yang lebih baik, malah sebaliknya hanya akan menumpuk kelas menengah baru di Muhammadiyah, dan faktanya mereka tidak ramah terhadap lingkungan sosialnya. Tentu diperlukan pembaruan "*nawaitu*" dalam berjuang di Muhammadiyah, di samping pembaruan sistem dan paradigma gerakan!

Beberapa tantangan besar dan riil yang bersifat transformatif tersebut penting untuk menandai babak baru "*jalan lurus*" lanjutan Muhammadiyah di tengah masyarakat. Jika sebelumnya jalan lurus itu bersifat karitatif di tengah situasi urbanisasi dan penajajahan, di mana Muhammadiyah hanya melakukan upaya pertolongan pertama terhadap kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan masyarakat saat itu. Muhammadiyah sekadar meringankan beban penderitaan dan membantu melakukan pengentasan secara sosial, maka jalan lurus lanjutan bermaksud membebaskan masyarakat dari kompleksitas pascaurbanisasi dan kepungan jejaring kapitalisme global. Dalam banyak hal, Muhammadiyah harus

berani menampilkan diri sebagai kuasa jejaring strategis yang mempunyai pengaruh terhadap hitam-putihnya dinamika sosial di masyarakat. Muhammadiyah dituntut turun ke masyarakat melakukan advokasi, pembelaan secara hukum, dan melawan segala kebijakan yang mengarah pada penciptaan kemiskinan struktural di masyarakat.

Jalan lurus lanjutan ini, bila benar dilakukan, maka akan mengantarkan Muhammadiyah kepada *zeitgeist* zaman yang membebaskan. Agenda dan *platform* gerakan yang tidak lagi memasung, melainkan menggerakkan dan mencerahkan. Suatu jalan lurus yang senantiasa memperbaiki diri bersandar pada perubahan zaman itu sendiri. Bukankah generasi awal Muhammadiyah pun berjalan menurut *zeitgeist* zamannya sendiri? Lantas kapan kita berubah dan menggerakkan menurut *zeitgeist* zaman kita sendiri, bukan menunggu dan pasrah digilas kereta senja zaman. ♦

Daftar Pustaka

- Achmad, Nur dan Pramono U.T, *Muhammadiyah "Digugat"*, Jakarta; Penerbit Buku Kompas, 2000
- Din Syamsuddin, M., [ed.], *Muhammadiyah Kini dan Esok*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990
- Fukuyama, Francis, *The Great Disruption: Hakikat Manusia dan Rekonstruksi Tatanan Sosial*, Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2002
- Giddens, Anthony, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern*, Jakarta: UI Press, 1986
- Hefner, Robert W., *Geger Tengger: Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik*, Yogyakarta: LKiS, 1999
- Jainuri, Achmad, *Ideologi Kaum Reformis. Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Periode Awal*, Surabaya: LPAM, 2002
- Rais, Amien, *Cakrawala Islam antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, 1987
- , *Tauhid Sosial Formula Menggempur Kesenjangan*, Mizan: Bandung, 1998
- Sairin, Weinata, *Gerakan Pembaruan Muhammadiyah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Shiraishi, Takashi, *Zaman Bergerak Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, Jakarta: Grafiti Pers, 1997
- Taha, Mahmoud Mohamed, *Syariah Demokratik*, Surabaya: Elsad, 1996
- Yusuf, M. Yunan [ed.], *Masyarakat Utama: Konsepsi dan Strategi*, Perkasa, Jakarta, 1995.

Now with the arrival of the era of democracy, the Muhammadiyah is free as an actor. It can be pro-active rather than reactive in its basic stance. Now the most crucial question is what course the Muhammadiyah is going to choose in the new environment of democracy. Objectively speaking, there seem to be open two alternatives to choose for the Muhammadiyah. One is to take advantage of the political freedom and deepen its involvement in politics. The other is to 'return' to its original stance of social and religious movement.

Prof. Dr. Mitsuo Nakamura.

Karena itu, kini diperlukan sosok kepemimpinan yang bukan hanya inklusif atau eksklusif, liberal atau konservatif, berpartai atau kukuh pada khittah sosial, tetapi yang berfungsi profetik. Sosok pemimpin profetis itu memiliki kekayaan spiritual di dalam kesediaan mendengar dan menghargai sesama, memiliki pergaulan luas dengan semua golongan, berempati kemanusiaan disertai kesadaran kritis pada tradisinya sendiri, selalu bersifat terbuka, dan dinamis serta mampu membangkitkan partisipasi publik.

Prof. Dr. Abdul Munir Mulkan.

Dengan mendasarkan pada metode *qiyas*, para ulama kemudian menentukan hukum bunga bank... kemudian dipahami oleh mayoritas ulama bahwa bunga bank merupakan sesuatu yang dilarang karena termasuk riba. Di sisi lain, Muhammadiyah masih agak gamang dalam memutuskan hukum bunga bank. Secara umum, pendapat resmi Muhammadiyah menyatakan bahwa bunga bank adalah *musytabihat*. Sampai kapan Muhammadiyah ragu?

Prof. Dr. Fathurrahman Djamil.

Bilamana sebagai organisasi keagamaan, Muhammadiyah telah sepakat bulat bahwa perbankan syariah itulah yang sesuai dengan akidah Islam, tentunya tidak ada alasan lagi bagi organisasi Muhammadiyah (dan keluarga besarnya) untuk tidak melakukan hijrah dari perbankan konvensional ke perbankan syariah.

Achjar Iljas, SE., MA., MH.

Pemikiran-pemikiran dalam buku ini secara umum bisa dikatakan sebagai "pemberontakan" terhadap kondisi Muhammadiyah yang hampir berusia 100 tahun dan bergerak sangat lambat (kalau tidak disebut stagnan) hampir di semua bidang: sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Karenanya, tawaran untuk melakukan "TAFSIR BARU" yang diharapkan bisa MEMBERI ROH BARU bagi Muhammadiyah dalam menjemput perubahan multidimensi adalah sebuah keniscayaan, bila tidak ingin terjerumus dalam lubang sejarah.

Pembaca akan banyak menemukan ide-ide cerdas, berani, dan disertai data-data yang tak terbantahkan. Dengan demikian buku ini sangat penting dibaca sebagai bahan pertimbangan mendasar dalam menggagas Muhammadiyah di masa depan.



KOMPAS
Penerbit Buku Kompas
Jl. Palmerah Selatan 26-28
Jakarta 10270
e-mail: buku@kompas.com

ISBN 979-709-198-8



KMN 26006032